GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 82 TAHUN 2025

TENTANG

STRUKTUR PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTAMA DAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (9) Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Struktur Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);

7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);

8. Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024 Nomor 51014);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG STRUKTUR PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTAMA DAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA.

KESATU : Menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dengan susunan keanggotaan dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Menetapkan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KETIGA : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 839 Tahun 2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Januari 2025

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

TEGUH SETYABUDI

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 82 TAHUN 2025

TENTANG
STRUKTUR PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTAMA DAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTAMA

NO.	JABATAN DALAM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTAMA	KETERANGAN JABATAN/INSTANSI
1.	Pembina	Gubernur DKI Jakarta
2.	Pengarah selaku Atasan Pejabat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama	Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3.	Tim Pertimbangan	1. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta 2. Inspektur 3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta 4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta 5. Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta 6. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta 7. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta 8. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta 9. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta 10. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta 11. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta 12. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
4.	Pejabat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
5.	Bidang Pengelolaan Informasi	Kepala Bidang Data dan Statistik Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
	Anggota	1. Ketua Subkelompok Pengelolaan Informasi Publik Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta 2. Ketua Subkelompok Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta

NO.	JABATAN DALAM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTAMA	KETERANGAN JABATAN/INSTANSI
6.	Bidang Dokumentasi dan Arsip	Kepala Bidang Pengelolaan Arsip dan Layanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta
	Anggota	1. Ketua Subkelompok Pengelolaan Arsip Dinamis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta 2. Ketua Subkelompok Pengelolaan Arsip Statis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta 3. Ketua Subkelompok Layanan dan Pemanfaatan Arsip Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta
7.	Bidang Pelayanan Informasi	Kepala Bidang Informasi Publik Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
	Anggota	1. Ketua Subkelompok Pelayanan Informasi Publik Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta 2. Ketua Subkelompok Layanan Hubungan Media Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
8.	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Kepala Bagian Advokasi Hukum Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
	Anggota	1. Ketua Subkelompok Advokasi I Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta 2. Ketua Subkelompok Advokasi II Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta 3. Ketua Subkelompok Advokasi III Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

TEGUH SETYABUDI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 82 TAHUN 2025

TENTANG
STRUKTUR PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTAMA DAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA

RINCIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI UTAMA

NO.	JABATAN DALAM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTAMA	KETERANGAN TUGAS
1.	Pembina	a. memberikan arahan dan pembinaan dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; dan b. sebagai penentu akhir pengambilan kebijakan apabila muncul masalah dalam pengelolaan dan pelaksanaan layanan informasi.
2.	Pengarah selaku Atasan Pejabat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama	a. mengawasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan layanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta melakukan evaluasi terhadap kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama; b. menerima permohonan keberatan atas penolakan dari pemohon informasi publik; c. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya laporan keberatan secara tertulis; dan d. mewakili Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam proses sengketa informasi.
3.	Tim Pertimbangan	a. memberikan pertimbangan dan/atau pendapat sesuai dengan keahliannya dalam proses layanan Informasi Publik; b. memberikan pertimbangan dan/atau pendapat sesuai dengan keahliannya dalam proses pengujian konsekuensi terhadap usulan informasi publik yang dikecualikan; dan c. memberikan pertimbangan dan/atau pendapat sesuai dengan keahliannya dalam proses penyelesaian sengketa informasi.

NO.	JABATAN DALAM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTAMA	KETERANGAN TUGAS
4.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama	a. menyusun dan melaksanakan kebijakan layanan informasi publik; b. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan layanan informasi publik; c. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik; d. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan dokumen informasi publik dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; e. memverifikasi dokumen informasi publik; f. menentukan informasi publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan; g. melakukan pengujian tentang konsekuensi atas informasi publik yang akan dikecualikan; h. mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik; i. menyediakan informasi publik secara efektif dan efisien agar mudah diakses oleh publik; j. membangun dan mengembangkan sistem penyimpanan, pengamanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik; dan k. melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan informasi publik yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi.
5.	Bidang Pengelolaan Informasi	a. mengelola dan menyajikan data sebagai bahan informasi publik yang akan dipublikasikan melalui situs resmi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan/ atau papan pengumuman di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; b. memutakhirkan data sebagai bahan informasi publik yang akan disesuaikan dengan klasifikasi informasi; dan c. menyimpan, memelihara, dan/atau mengubah data dan informasi dalam format yang dibutuhkan dengan menggunakan sarana komunikasi yang efektif untuk pelayanan sesuai dengan kemampuan sumber daya di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

NO.	JABATAN DALAM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTAMA	KETERANGAN TUGAS
6.	Bidang Dokumentasi dan Arsip	a. mendokumentasikan, menyimpan, mengolah, serta memelihara arsip dan dokumen peraturan perundang-undangan, persidangan, dan kepegawaian, serta arsip dan dokumen lainnya; dan b. melayani penggunaan arsip dan dokumen peraturan perundang-undangan, persidangan, dan kepegawaian, serta arsip dan dokumen lainnya.
7.	Bidang Pelayanan Informasi	a. memberikan informasi mengenai prosedur permohonan informasi, sarana, dan membantu pemohon memperoleh informasi; b. menerima dan melayani permintaan informasi publik serta menyampaikan salinan informasi yang dimohonkan; c. menyampaikan informasi publik dalam bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat, dengan kemungkinan menggunakan bahasa lokal yang digunakan oleh mayoritas penduduk setempat; d. meneruskan permintaan informasi publik dari pemohon kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada PD/UKPD apabila tidak berada dalam daftar informasi yang dikuasainya; e. menetapkan permintaan informasi publik apabila tidak diterima jika syarat pengajuan permintaan informasi tidak lengkap serta membantu melengkapi syarat pengajuan permintaan informasi tersebut; dan f. memberikan pelayanan pendaftaran dan penerusan pernyataan keberatan atas permohonan informasi kepada Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
8.	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	mengoordinasikan dan mendampingi penanganan, pengkajian masalah pengaduan, dan penyelesaian sengketa informasi publik pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada PD/UKPD.

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

TEGUH SETYABUDI

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 82 TAHUN 2025

TENTANG
STRUKTUR PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTAMA DAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA

ATASAN PPID PELAKSANA DAN PPID PELAKSANA PADA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PADA PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NO.	PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PADA PERANGKAT DAERAH	ATASAN PPID PELAKSANA	PPID PELAKSANA
PERANGKAT DAERAH (PD)			
1.	Inspektorat Provinsi DKI Jakarta	Inspektur Provinsi DKI Jakarta	Sekretaris Inspektorat Provinsi DKI Jakarta
2.	Kota Administrasi Jakarta Pusat	Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat	Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Pusat
3.	Kota Administrasi Jakarta Barat	Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat	Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat
4.	Kota Administrasi Jakarta Timur	Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur	Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur
5.	Kota Administrasi Jakarta Selatan	Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan	Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Selatan
6.	Kota Administrasi Jakarta Utara	Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara	Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Utara
7.	Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	Sekretaris Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
8.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
9.	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
10.	Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta	Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta	Sekretaris Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
11.	Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta	Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta	Kepala Unit Pusat Data dan Informasi Pendapatan Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta

NO.	PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PADA PERANGKAT DAERAH	ATASAN PPID PELAKSANA	PPID PELAKSANA
12.	Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta	Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta	Sekretaris Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
13.	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta	Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
14.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta	Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta	Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta
15.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta
16.	Badan Pelayanan Pengadaan Barang/ Jasa Provinsi DKI Jakarta	Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/ Jasa Provinsi DKI Jakarta	Sekretaris Badan Pelayanan Pengadaan Barang/ Jasa Provinsi DKI Jakarta
17.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta	Sekretaris Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta
18.	Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta	Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta	Sekretaris Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
19.	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta	Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta	Sekretaris Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
20.	Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta	Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta	Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta
21.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta
22.	Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta	Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
23.	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta	Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta	Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta
24.	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta	Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
25.	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta

NO.	PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PADA PERANGKAT DAERAH	ATASAN PPID PELAKSANA	PPID PELAKSANA
26.	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta	Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta	Sekretaris Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta
27.	Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta	Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta	Sekretaris Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
28.	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta	Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta	Sekretaris Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
29.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
30.	Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta	Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta	Sekretaris Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta
31.	Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta	Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta	Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
32.	Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta	Kepala Pusat Data dan Informasi Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
33.	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta	Kepala Pusat Data dan Informasi Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta
34.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta	Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
35.	Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta	Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta	Kepala Pusat Data dan Informasi Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta
36.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi DKI Jakarta	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta	Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta
37.	Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta	Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta	Sekretaris Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
38.	Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta	Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta	Sekretaris Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
39.	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta	Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta	Sekretaris Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta

NO.	PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PADA PERANGKAT DAERAH	ATASAN PPID PELAKSANA	PPID PELAKSANA
40.	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta	Kepala Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
41.	Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta	Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta	Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol DPRD Provinsi DKI Jakarta
42.	Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta	Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta	Ketua Kelompok Otonomi Daerah, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
43.	Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta	Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan I Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
44.	Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta	Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta	Ketua Kelompok Reformasi Birokrasi dan Budaya Kerja Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta
45.	Biro Kepala Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta	Kepala Biro Kepala Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta	Kepala Bagian Naskah Dinas Biro Kepala Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta
46.	Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta	Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta	Analis Kebijakan Ahli Muda Selaku Koordinator Urusan Pangan dan Ekonomi Daerah Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta
47.	Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta	Kepala Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta	Kepala Bagian Administrasi Sekretariat Daerah dan Deputi Gubernur Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta
48.	Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta	Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta	Ketua Kelompok Pembangunan Kota Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
49.	Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta	Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta	Kepala Subbagian Tata Usaha Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta

NO.	PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PADA PERANGKAT DAERAH	ATASAN PPID PELAKSANA	PPID PELAKSANA
50.	Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta	Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta	Ketua Kelompok Kebudayaan, Perpustakaan, dan Kearsipan Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
51.	Biro Kerja Sama Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta	Kepala Biro Kerja Sama Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta	Kepala Bagian Perjalanan Dinas Biro Kerja Sama Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta
UNIT KERJA PADA PERANGKAT DAERAH (UKPD)			
A. UKPD KOTA/KABUPATEN ADMINISTRASI			
1.	Kecamatan Kota/ Kabupaten Administrasi Provinsi DKI Jakarta	Camat Kota/Kabupaten Administrasi Provinsi DKI Jakarta	Sekretaris Kecamatan Kota/Kabupaten Administrasi Provinsi DKI Jakarta
2.	Kelurahan Kota/ Kabupaten Administrasi Provinsi DKI Jakarta	Lurah Kota/Kabupaten Administrasi Provinsi DKI Jakarta	Sekretaris Kelurahan Kota/Kabupaten Administrasi Provinsi DKI Jakarta
B. UKPD DINAS KESEHATAN PROVINSI DKI JAKARTA			
1.	Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Pusat	Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Pusat	Kepala Subbagian Tata Usaha Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Pusat
2.	Puskesmas di bawah lingkup kerja Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat	Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Pusat	Kepala Subbagian Tata Usaha Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Pusat
3.	Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Utara	Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Utara	Kepala Subbagian Tata Usaha Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Utara
4.	Puskesmas di bawah lingkup kerja Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara	Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Utara	Kepala Subbagian Tata Usaha Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Utara
5.	Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat	Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat	Kepala Subbagian Tata Usaha Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat
6.	Puskesmas di bawah lingkup kerja Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat	Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat	Kepala Subbagian Tata Usaha Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat

NO.	PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PADA PERANGKAT DAERAH	ATASAN PPID PELAKSANA	PPID PELAKSANA
7.	Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan	Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan	Kepala Subbagian Tata Usaha Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan
8.	Puskesmas di bawah lingkup kerja Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan	Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan	Kepala Subbagian Tata Usaha Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan
9.	Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Timur	Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Timur	Kepala Subbagian Tata Usaha Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Timur
10.	Puskesmas di bawah lingkup kerja Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur	Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Timur	Kepala Subbagian Tata Usaha Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Timur
11.	Suku Dinas Kesehatan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	Kepala Suku Dinas Kesehatan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	Kepala Subbagian Tata Usaha Suku Dinas Kesehatan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
12.	Puskesmas di bawah lingkup kerja Wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	Kepala Suku Dinas Kesehatan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	Kepala Subbagian Tata Usaha Suku Dinas Kesehatan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
13.	RSUD Tarakan	Direktur RSUD Tarakan	Wakil Direktur Administrasi Umum dan Keuangan RSUD Tarakan
14.	RSUD Cempaka Putih	Direktur RSUD Cempaka Putih	Kepala Subbagian Tata Usaha RSUD Cempaka Putih
15.	RSUD Johar Baru	Direktur RSUD Johar Baru	Kepala Subbagian Tata Usaha RSUD Johar Baru
16.	RSUD Sawah Besar	Direktur RSUD Sawah Besar	Kepala Subbagian Tata Usaha RSUD Sawah Besar
17.	RSUD Kemayoran	Direktur RSUD Kemayoran	Kepala Subbagian Tata Usaha RSUD Kemayoran
18.	RSUD Tanah Abang	Direktur RSUD Tanah Abang	Kepala Subbagian Tata Usaha RSUD Tanah Abang
19.	RSUD Koja	Direktur RSUD Koja	Wakil Direktur Administrasi Umum dan Keuangan RSUD Koja
20.	RSUD Cilincing	Direktur RSUD Cilincing	Kepala Bagian Administrasi Umum dan Keuangan RSUD Cilincing

NO.	PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PADA PERANGKAT DAERAH	ATASAN PPID PELAKSANA	PPID PELAKSANA
21.	RSUD Pademangan	Direktur RSUD Pademangan	Kepala Subbagian Tata Usaha RSUD Pademangan
22.	RSUD Tugu Koja	Direktur RSUD Tugu Koja	Kepala Bagian Administrasi Umum dan Keuangan RSUD Tugu Koja
23.	RSUD Tanjung Priok	Direktur RSUD Tanjung Priok	Kepala Subbagian Tata Usaha RSUD Tanjung Priok
24.	RSUD Pasar Minggu	Direktur RSUD Pasar Minggu	Wakil Direktur Administrasi Umum dan Keuangan RSUD Minggu
25.	RSUD Kebayoran Baru	Direktur RSUD Kebayoran Baru	Kepala Subbagian Tata Usaha RSUD Kebayoran Baru
26.	RSUD Jati Padang	Direktur RSUD Jati Padang	Kepala Subbagian Tata Usaha RSUD Jati Padang
27.	RSUD Kebayoran Lama	Direktur RSUD Kebayoran Lama	Kepala Subbagian Tata Usaha RSUD Kebayoran Lama
28.	RSUD Tebet	Direktur RSUD Tebet	Kepala Bagian Umum dan Keuangan RSUD Tebet
29.	RSUD Mampang Prapatan	Direktur RSUD Mampang Prapatan	Kepala Subbagian Tata Usaha RSUD Mampang Prapatan
30.	RSUD Jagakarsa	Direktur RSUD Jagakarsa	Kepala Subbagian Tata Usaha RSUD Jagakarsa
31.	RSUD Pesanggrahan	Direktur RSUD Pesanggrahan	Kepala Bagian Umum dan Keuangan RSUD Pesanggrahan
32.	RSUD Pasar Rebo	Direktur RSUD Pasar Rebo	Wakil Direktur Administrasi Umum dan Keuangan RSUD Pasar Rebo
33.	RSUD Budhi Asih	Direktur RSUD Budhi Asih	Wakil Direktur Administrasi Umum dan Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih
34.	RSKD Duren Sawit	Direktur RSKD Duren sawit	Wakil Direktur Administrasi Keuangan dan Umum RSKD Duren Sawit
35.	RSUD Cipayung	Direktur RSUD Cipayung	Kepala Subbagian Tata Usaha RSUD Cipayung
36.	RSUD Ciracas	Direktur RSUD Ciracas	Kepala Subbagian Tata Usaha RSUD Ciracas
37.	RSUD Kramat Jati	Direktur RSUD Kramat Jati	Kepala Bagian Administrasi Umum dan Keuangan RSUD Kramat Jati
38.	RSUD Matraman	Direktur RSUD Matraman	Kepala Subbagian Tata Usaha RSUD Matraman

NO.	PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PADA PERANGKAT DAERAH	ATASAN PPID PELAKSANA	PPID PELAKSANA
39.	RSUD Cengkareng	Direktur RSUD Cengkareng	Wakil Direktur Administrasi Umum dan Keuangan RSUD Pasar Cengkareng
40.	RSUD Kembangan	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kembangan	Kepala Subbagian Tata Usaha Rumah Sakit Umum Daerah Kembangan
41.	RSUD Kalideres	Direktur RSUD Kalideres	Kepala Subbagian Tata Usaha RSUD Kalideres
42.	RSUD Taman Sari	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Taman Sari	Kepala Subbagian Tata Usaha RSUD Taman Sari
43.	RSUD Kepulauan Seribu	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kepulauan Seribu	Kepala Subbagian Tata Usaha RSUD Kepulauan Seribu
C. UKPD DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DKI JAKARTA			
1.	Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Barat	Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Barat	Kepala Subbagian Tata Usaha Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Barat
2.	Satuan Pendidikan Negeri di bawah lingkup kerja Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Barat	Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Barat	Kepala Subbagian Tata Usaha Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Barat
3.	Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Barat	Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Barat	Kepala Subbagian Tata Usaha Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Barat
4.	Satuan Pendidikan Negeri di bawah lingkup kerja Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Barat	Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Barat	Kepala Subbagian Tata Usaha Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Barat
5.	Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Pusat	Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Pusat	Kepala Subbagian Tata Usaha Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Pusat
6.	Satuan Pendidikan Negeri di bawah lingkup kerja Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Pusat	Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Pusat	Kepala Subbagian Tata Usaha Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Pusat

NO.	PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PADA PERANGKAT DAERAH	ATASAN PPID PELAKSANA	PPID PELAKSANA
7.	Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Pusat	Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Pusat	Kepala Subbagian Tata Usaha Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Pusat
8.	Satuan Pendidikan Negeri di bawah lingkup kerja Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Pusat	Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Pusat	Kepala Subbagian Tata Usaha Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Pusat
9.	Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Selatan	Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Selatan	Kepala Subbagian Tata Usaha Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Selatan
10.	Satuan Pendidikan Negeri di bawah lingkup kerja Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Selatan	Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Selatan	Kepala Subbagian Tata Usaha Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Selatan
11.	Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Selatan	Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Selatan	Kepala Subbagian Tata Usaha Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Selatan
12.	Satuan Pendidikan Negeri di bawah lingkup kerja Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Selatan	Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Selatan	Kepala Subbagian Tata Usaha Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Selatan
13.	Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Timur	Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Timur	Kepala Subbagian Tata Usaha Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Timur
14.	Satuan Pendidikan Negeri di bawah lingkup kerja Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Timur	Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Timur	Kepala Subbagian Tata Usaha Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Timur
15.	Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Timur	Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Timur	Kepala Subbagian Tata Usaha Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Timur

NO.	PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PADA PERANGKAT DAERAH	ATASAN PPID PELAKSANA	PPID PELAKSANA
16.	Satuan Pendidikan Negeri di bawah lingkup kerja Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Timur	Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Timur	Kepala Subbagian Tata Usaha Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Timur
17.	Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Utara	Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Utara	Kepala Subbagian Tata Usaha Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Utara
18.	Satuan Pendidikan Negeri di bawah lingkup kerja Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Utara	Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Utara	Kepala Subbagian Tata Usaha Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Utara
19.	Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Utara	Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Utara	Kepala Subbagian Tata Usaha Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Utara
20.	Satuan Pendidikan Negeri di bawah lingkup kerja Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Utara	Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Utara	Kepala Subbagian Tata Usaha Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Utara
21.	Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	Kepala Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	Kepala Subbagian Tata Usaha Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
22.	Satuan Pendidikan Negeri di bawah lingkup kerja Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	Kepala Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	Kepala Subbagian Tata Usaha Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

TEGUH SETYABUDI